

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI
DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, BADAN NARKOTIKA NASIONAL,
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME, DAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2014
Masa Persidangan : I
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : RDP Komisi III DPR RI
Hari,tanggal : Rabu, 3 September 2014
Waktu : Pukul 10.00 s.d 12.40 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Ir. Tjatur Sapto Eddy, MT. / Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Budi Utami, M.Si / Kabag Set.Komisi III DPR-RI.
Hadir : 15 orang Anggota dari 49 orang Anggota Komisi III DPR-RI.
Izin : 3 orang Anggota.
Acara : Penjelasan RKA K/L Tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Dan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

RDP Komisi III DPR RI dibuka pukul 14.19 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ir. Tjatur Sapto Eddy, MT, dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Pimpinan rapat menyampaikan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh Pimpinan Badan Anggaran DPR RI melalui surat Nomor : AG / 07500/ DPR RI/VIII/2014, tertanggal 22 Agustus 2014, perihal penyampaian Perubahan Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2015, Komisi III DPR RI tanggal 2 dan 3 September 2014 telah menjadwalkan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI untuk mendengarkan penjelasan mengenai Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga untuk Tahun 2015.

- 2) Adapun pagu Indikatif dari :
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp.898.908.900.000
 - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebesar Rp.75.474.000.000
 - Badan Narkotika Nasional sebesar Rp.899.244.000.000
 - Badan Nasional Penanggulangan Teroris sebesar Rp.64.681.096.000
 - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebesar Rp. 71.308.000.000
 - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Rp.148.000.000.000,-
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional dalam Rapat Dengar Pendapat menjelaskan RKA-K/L Tahun 2015, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Pagu Anggaran BNN TA 2015 sebesar Rp.899.244.000.000 untuk membiayai kegiatan, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Program Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba sebesar Rp.525.985.862.000
 - Prioritas Bidang sebesar Rp.483.554.662.000,-
 - Prioritas K/L sebesar Rp.42.431.200.000,-
 - b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp. 373.258.138.000
 - Usulan Penambahan Anggaran BNN TA 2015 sebesar Rp.404.691.974.700,- dengan rincian, sebagai berikut :
 1. Pembangunan Balai Rehabilitasi BNN di Sumatera Utara sebesar Rp.60.000.000.000
 2. Penyelenggaraan Jaringan Sistem Informasi Pecandu Narkotika (Si Can Tik) sejumlah 75 titik sebesar Rp.44.664.924.700
 3. Pengadaan tanah seluas 6.423 M² yang diperuntukkan bagi Gedung BNN Pusat sebesar Rp.130.000.000.000
 4. Pengadaan peralatan interdiksi (X-Ray/Detector) dan peralatan intelijen (Alat Sadap/CDR Collector) Rp.170.027.050.000
3. Beberapa hal yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap RKAK-L Tahun 2015, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 278/KMK.02/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Penetapan Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Langkah-langkah Penyelesaian RKA KL Tahun 2015, KPK mendapat Pagu Anggaran TA 2015 sebesar Rp898,909 Miliar yang seluruhnya bersumber dari APBN Rupiah Murni.
 - Pagu Anggaran KPK 2015, dirinci menurut program adalah sebagai berikut:
 - a. Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp247,849 Miliar
 - b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp651,060 Miliar
 - Atas dasar Pagu Anggaran KPK tahun 2015 tersebut, disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPK Tahun 2015 yang berisi program, kegiatan, target output, dan anggaran masing-masing unit kerja tahun 2015, dengan ringkasan sebagai berikut:
 - a. Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 247.849,290.000,-
 - b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPK sebesar Rp.651.059,610.000,-
 - Pembangunan gedung KPK dilaksanakan secara multi years dengan rencana anggaran total sebesar Rp225,712 Miliar, dengan alokasi per tahun:
 - Tahun 2013: Rp 40,798 Miliar;
 - Tahun 2014: Rp110,085 Miliar;

• Tahun 2015: Rp 74,827 Miliar.

4. Beberapa hal yang disampaikan oleh PPATK dalam pembahasan RKA K/L Tahun 2015, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK.02/2014 tanggal 10 Juli 2014, pagu anggaran PPATK ditetapkan sebesar Rp75.474.000.000,- untuk membiayai 3 program kegiatan sebagai berikut :

No.	PROGRAM/KEGIATAN	(Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	49.153.900.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK	4.525.000.000
3.	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	21.795.100.000
	Jumlah	75.474.000.000,-

- Berkaitan dengan penetapan alokasi belanja pegawai PPATK TA 2015 sebesar RP.31.418.0004.000,- perkiraan realisasi belanja pegawai Rp.33.869.408.000,- dengan demikian diperlukan tambahan alokasi belanja pegawai sebesar Rp.2.451.404.000,-
- PPATK mengajukan tambahan alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp.77.925.404.000,-

5. Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala BNPT, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 278/Kmk.02/2014 Tanggal 10 Juli 2014 Perihal Penetapan Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Langkah-Langkah Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2015, Pagu Anggaran Bnpt Tahun Anggaran 2015 Sebesar Rp 311.233.000.000,- dengan sasaran kegiatan : Pencegahan, Penindakan Dan Kerjasama Internasional.
- BNPT mengajukan usulan penambahan alokasi anggaran sebesar **Rp.92.312.500.000,-** (*Sembilan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk pengadaan Tanah seluas 3500 m2 (Rp 26.375.000,- / meter, untuk Gedung Kantor mengingat tugas fungsi BNPT yang spesifik di bidang ketertiban dan keamanan, sehingga diperlukan Gedung Kantor tersendiri.

6. Beberapa hal yang disampaikan oleh LPSK dalam pembahasan RKA K/L Tahun 2015, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pagu Anggaran LPSK tahun 2015 sebesar Rp.148.000.000.000,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No	Program Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban dan Dukungan Lainnya di Lingkungan LPSK	Jumlah
1	Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban dalam Peradilan Pidana	19,483,700,000
2.	Kegiatan diseminasi dan hubungan masyarakat	4.538.000.000
3	Kegiatan Hukum, Kerjasama dan pengawasan internal	4.492.000.000
4	Kegiatan operasional Perkantoran	19,605,000,000

5	Pengadaan Kendaraan Bermotor	175,000,000
6	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1,000,000,000
7	Gedung / Bangunan	86,000,000,000
TOTAL		148,000,000,000

7. Beberapa hal yang disampaikan oleh Komnas HAM, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2015 adalah sebesar : Rp. 71.308.000.000,-
 - Belanja Pegawai : Rp. 22.410.200.000,-
 - Belanja Operasional : Rp. 16.000.000.000,-
- Pagu Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.71.307.900.000,- (tujuh puluh satu milyar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dijabarkan dalam program-program sebagai berikut :
 1. Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara Rp.6.911.700.000
 2. Peningkatan Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Rp. 12.150.000.000
 3. Pencegahan Dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Pemenuhan Hak Korban Rp. 9.712.300.000
 4. Pengembangan Perencanaan Dan Kerjasama Komnas Ham Rp.7.141.500.000
 5. Peningkatan Pelayanan Umum Rp. 35.392.400.000
- Komnas HAM TA 2015 mengajukan usulan kebutuhan tambahan Rupiah Murni sebesar Rp.23.969.800.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Belanja Operasional sebesar Rp.18.119.800.000,- terdiri dari:
 - Belanja Pegawai Tidak Tetap Rp. 3.105.100.000,- (Tiga Milyar Seratus Lima Juta Seratus Ribu Rupiah)
 - Belanja Barang Operasional Hayam Wuruk Rp. 4.014.700.000,- (Empat Milyar Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
 - belanja pegawai untuk remunerasi Rp.11.000.000.000,-
 - Belanja non operasional Rp. 5.850.000.000,-
 - Belanja modal Hayam Wuruk Rp.1.000.000.000,-
 2. Pencapaian output pencegahan kekerasan terhadap perempuan Rp.4.850.000.000,-
- Komnas HAM mengharapkan dukungan Komisi III DPR RI untuk memberikan dukungan ketersediaan kecukupan alokasi anggaran guna mendukung fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam 4 (empat) undang-undang.

8. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok - pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut :

- Bagaimana LPSK melindungi saksi dan korban dengan anggaran yang tersedia sekitar Rp.19 miliar.
- Meminta penjelasan BNPT terkait usulan pembangunan gedung BNPT di Jakarta pusat yang harganya sangat tinggi. Meminta BNPT untuk mempertimbangkan lokasi pembangunan gedung di Jakarta dengan melihat anggaran yang tersedia.
-

- Meminta penjelasan BNN terkait skala prioritas utama pengajuan usulan penambahan anggaran yang diajukan tahun 2015.
- Komnas HAM menjelaskan bahwa usulan penambahan anggaran untuk mendukung fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM. Komnas HAM telah banyak melakukan pengusutan kasus-kasus pelanggaran HAM, dan juga mengajukan amandemen UU tentang Komnas untuk penguatan kelembagaan.
- Bahwa anggaran LPSK sedikit turun setelah dikurangi pembangunan gedung, LPSK minta dukungan Komisi III DPR RI apabila nanti mengajukan RAPBN-P 2015.
- BNPT menjelaskan terkait rencana pembangunan gedung di Jakarta Pusat harganya tinggi, apabila disetujui Komisi III, rencana pembangunan gedung tersebut dapat dialihkan ke lokasi lain.
- Anggaran PPATK digunakan untuk kegiatan dukungan manajemen, kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, layanan perbendaharaan, pengelolaan belanja pegawai, untuk itu memohon komisi III untuk dapat menyetujui tambahan anggaran sebesar RP.75.474.000.000,-
- KPK menjelaskan bahwa penerimaan Negara harus dikelola dengan baik, pencegahan dan supervisi ditingkatkan agar dampaknya dibidang pencegahan lebih kredibel, dari aspek penerimaan memang tidak terlalu besar, KPK sudah membuat perencanaan yang berkelanjutan, perencanaan itu yang menjadi baku dalam pelaksanaan. Dalam penanganan korupsi semakin lama semakin kompleks, semakin sulit dan biayanya tinggi.
- BNN, memang mengajukan anggaran untuk pencegahan, rehabilitasi, reorientasi khusus bagi peyalahgunaan narkotika yang sekarang ini tidak ditahan.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Dan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan tidak mengambil keputusan/kesimpulan. Dan terkait dengan usulan RKA K/L Tahun 2015 dari masing-masing mitra kerja Komisi III, akan dibahas dalam Rapat Intern Komisi III dimana fraksi-fraksi yang ada di Komisi III akan menyampaikan pandangannya dalam Rapat Intern yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 3 September 2014, Pkl.13.00 WIB.

Rapat ditutup tepat pukul 12.40 WIB

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,**

Ir. TJATUR SAPTO EDDY, MT.